

# Logistics Journal

[www.alfijatim.org](http://www.alfijatim.org)  
[alfijatim@alfijatim.or.id](mailto:alfijatim@alfijatim.or.id)

## **Terminal Teluk Lamong Handle 2,8 Juta TEUs Sepanjang Tahun 2025**

**Perlancar Arus Logistik, Purbaya Batasi Penimbunan di TPS 30 Hari**

**Pelindo Multi Terminal Pastikan Layanan Pelabuhan Tetap Berjalan Optimal di Periode Libur Nataru**



Pemimpin Umum  
/Penanggungjawab :

Sebastian Wibisono, S.E

Pemimpin Redaksi

M. Diah Agus Muslim

Dewan Redaksi :

Budi Leksono

Palevi V. Masdulhak

M. Husni

Yayuk Suryawati

Candra Ary Irawan

Kristanti Erisandi Mahendra

Firesa Erik Christian Cahyono

Alphard Rezha Perdana

Yosua Bati

Savira Amanda Probo Putri

Ika Rachma Nataria

FX. Tri Parmadi

Suroso Keri Wibowo

Iko Sukma Handriandianto, S.E

Andre Julius Lamahayu

Patut Sri Kuncoro

Penanggungjawab

Penerbitan :

Ima Sumaryani

Distribusi/Iklan :

Darmono

Desainer

Febri Jafriya Finuri, S.Kom.

Alamat Redaksi :

Jl. Perak Barat No. 211

Surabaya 60165

T. (031) 329 2310, 329 7280

F. (031) 329 7892

www.alfijatim.org

alfijatim@alfijatim.or.id

## Capaian Arus Petikemas 2025: Bukti Konsistensi Kinerja PT Terminal Teluk Lamong

Sepanjang tahun 2025, PT Terminal Teluk Lamong (TTL) kembali menorehkan kinerja positif melalui capaian arus petikemas yang menunjukkan tren pertumbuhan berkelanjutan. Di tengah dinamika industri logistik global, fluktuasi perdagangan internasional, serta tantangan rantai pasok nasional, TTL mampu mempertahankan perannya sebagai terminal petikemas modern yang andal dan berdaya saing tinggi.

Peningkatan arus petikemas ini mencerminkan kepercayaan para pengguna jasa terhadap kualitas layanan TTL, baik dari sisi operasional, keandalan sistem, maupun kepastian waktu pelayanan. Terminal yang dikenal sebagai green and smart port ini terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi otomasi, sistem digital terintegrasi, serta pengelolaan operasional berbasis data untuk memastikan kelancaran bongkar muat petikemas.

Sepanjang 2025, TTL berhasil mengelola arus petikemas domestik dan internasional secara efisien, didukung oleh produktivitas alat yang stabil serta kesiapan infrastruktur yang memadai. Konsistensi kinerja ini tidak terlepas dari strategi peningkatan berth productivity, optimalisasi yard occupancy ratio, serta penerapan planning and control system yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna jasa.

Selain aspek operasional, capaian arus petikemas TTL juga menjadi indikator keberhasilan sinergi dengan para pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan pelayaran, ekspedisi muatan kapal laut, hingga otoritas kepelabuhanan. Kolaborasi yang solid ini memperkuat posisi Terminal Teluk Lamong sebagai simpul logistik strategis di Indonesia.

Menatap ke depan, capaian arus petikemas sepanjang 2025 menjadi fondasi kuat bagi PT Terminal Teluk Lamong untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Dengan fokus pada transformasi digital, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan layanan bernilai tambah, TTL optimistis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan dan memberikan kontribusi nyata bagi daya saing logistik nasional.

Capaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari kerja keras, komitmen, dan visi jangka panjang PT Terminal Teluk Lamong dalam mendukung ekosistem kepelabuhanan Indonesia yang modern, efisien, dan berkelanjutan (Guslim – Jan 26).

## PENGURUS DPW ALFI/ILFA JATIM



## Terminal Teluk Lamong Handle 2,8 Juta TEUs Sepanjang Tahun 2025

**SURABAYA (LOGISTIK) : PT Terminal Teluk Lamong (TTL) mencatatkan capaian arus petikemas yang baik sepanjang Tahun 2025 dengan membukukan arus petikemas sebesar 2.827.256 twenty foot equivalent units (TEUs) atau naik sebesar 6% dari Tahun 2024 yang tercatat 2.673.125 TEUs.**

Angka ini merupakan performa dari tiga terminal Petikemas dibawah manajemen TTL, yaitu TPK Teluk Lamong, TPK Nilam, dan TPK Berlian. Keberhasilan ini tidak sekadar angka statistik, melainkan manifestasi dari meningkatnya kepercayaan global terhadap TTL sebagai hub perdagangan strategis di Jawa Timur.

Peningkatan capaian arus petikemas ini selaras dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terus menunjukkan resiliensi, di mana aktivitas bongkar muat pelabuhan menjadi motor utama penggerak sektor transportasi dan perdagangan yang tumbuh stabil di angka 6,5% secara tahunan.

TPK Teluk Lamong menunjukkan performa ekspansif dengan mencatat lonjakan layanan petikemas internasional dengan kenaikan sebesar 25%, meningkat signifikan dari 306.030 TEUs pada 2024 menjadi 382.612 TEUs pada 2025.

Pertumbuhan tersebut dipegaruhi adanya 34 unit

kapal Petikemas adhoc serta 5 new service pelayanan petikemas internasional yang dilayani di TTL pada Tahun 2025.

Secara sektoral, lonjakan arus petikemas internasional ini didominasi oleh komoditas ekspor manufaktur seperti produk kimia, komponen elektronik, dan furnitur, serta impor bahan baku industri yang meningkat tajam seiring dengan ekspansi kawasan industri di Jawa Timur.

Sejalan dengan penguatan konektivitas domestik melalui TPK Nilam dan TPK Berlian juga menunjukkan tren positif.

Selama periode tahun 2025, TPK Nilam mencatatkan pertumbuhan 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 437.211 TEUs menjadi 490.878 TEUs, ini dikarenakan tingginya permintaan komoditas barang konsumsi (fast-moving consumer goods), semen, dan produk besi baja menuju Banjarmasin, Kendari, Bau-Bau, dan Berau.



Di sisi lain, TPK Berlian juga mengalami pertumbuhan sebesar 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 1.344.223 TEUs menjadi 1.386.570 TEUs.

Capaian ini didominasi rute Makassar dan wilayah Indonesia Timur di TPK Berlian, yang banyak mengangkut komoditas pangan pokok dan bahan bangunan, membuktikan bahwa terminal ini memegang peranan kunci dalam menjaga stabilitas pasokan logistik nasional sesuai dengan visi ketahanan pangan 2025.

Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong, David Pandapotan Sirait, menegaskan bahwa kepercayaan pengguna jasa adalah fondasi utama dari pencapaian ini dan adanya penambahan layanan baru serta kunjungan kapal internasional sepanjang tahun 2025 merupakan pengakuan nyata atas keunggulan operasional TTL.

“TTL akan terus bertransformasi dan melakukan inovasi-inovasi untuk mewujudkan kualitas

layanan yang prima, perluasan sinergi dengan mitra strategis dan juga optimalisasi konektivitas logistik melalui integrasi layanan pelabuhan yang komprehensif juga akan terus kami lakukan guna menghadirkan nilai tambah yang nyata serta daya saing kompetitif bagi seluruh pengguna jasa,” ujar David, pada Jumat (9/1/2026).

Melalui semangat memberikan layanan Operational and Commercial Excellent kepada pengguna jasa, PT Terminal Teluk Lamong terus bertransformasi untuk memberikan kepastian sandar dan kecepatan bongkar muat yang optimal.

“Menghadapi tahun 2026, dengan mengintegrasikan keunggulan infrastruktur dan sistem digitalisasi terminal petikemas, PT TTL siap berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tantangan logistik Jawa Timur serta bagi kemajuan maritim Indonesia,” ucap David.



## Lakukan Audit ISO, Cara TTL Memastikan Performance Tetap Handal

PT Terminal Teluk Lamong (TTL) melaksanakan Audit Eksternal Sistem Manajemen Terintegrasi ISO Series Tahun 2026 sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga keandalan operasional dan tata kelola yang berkelanjutan. Audit ini dilaksanakan secara bertahap mulai 12 hingga 30 Januari 2026.

Audit ISO terintegrasi tersebut mencakup beberapa standar internasional, yaitu ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), ISO 50001:2018 (Sistem Manajemen Energi), serta ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

Pelaksanaan audit dilakukan di PT Terminal Teluk Lamong, Terminal Petikemas (TPK) Teluk Lamong, TPK Berlian dan TPK Nilam.

Pelaksanaan audit ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses bisnis PT Terminal Teluk Lamong berjalan secara efektif, aman, efisien, serta berlandaskan prinsip integritas dan kepatuhan.

Dengan penerapan sistem manajemen yang terintegrasi, perusahaan dapat mengelola risiko secara lebih komprehensif, meningkatkan konsistensi kinerja operasional, serta mendukung pencapaian sasaran strategis perusahaan.

Rangkaian audit dilaksanakan oleh auditor eksternal independen, diawali dengan opening meeting, dilanjutkan dengan audit lapangan sesuai audit plan, dan diakhiri dengan closing meeting.

Seluruh unit kerja di lingkungan PT Terminal Teluk Lamong berperan aktif dalam proses audit

melalui penyediaan data dan dokumen sebagai bukti penerapan sistem manajemen sepanjang tahun 2025.

Direktur Operasi PT Terminal Teluk Lamong, M. Syukur menyampaikan bahwa audit ISO terintegrasi tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan sertifikasi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

“Penerapan ISO secara terintegrasi membantu TTL menjaga konsistensi kualitas layanan, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, mengoptimalkan penggunaan energi, serta memperkuat sistem pencegahan penyuapan. Hal ini berdampak langsung pada keandalan operasional dan peningkatan kepercayaan para pemangku kepentingan,” ujarnya, pada Selasa (20/1/2026).

Dia mengatakan, audit 4 sistem manajemen ISO series yang dilaksanakan secara terintegrasi ini selain berdampak pada proses audit yang menjadi efektif juga memiliki tantangannya sendiri, dimana tim harus sangat siap dalam hal dokumentasi dan implementasi lapangan.

“Metode ini terbukti lebih efisien dan efektif karena waktu audit akan lebih singkat dan hasilnya lebih komprehensif karena tidak berdiri sendiri-sendiri sistem manajemennya” ucap Syukur.

Melalui pelaksanaan audit ini, imbuhnya, PT Terminal Teluk Lamong menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan, serta menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan guna mendukung layanan kepelabuhanan yang andal, aman, dan berdaya saing bagi pengguna jasa (Logistik/logistiknews.id /hd).

## REDAKSI LOGISTIK JOURNAL

Menerima sumbangan tulisan berupa berita artikel atau informasi lainnya, tulisan yang aktual dan menambah wawasan pelaku usaha forwarder & logistik.



Kirimkan ke : Redaksi Logistics Journal

Jl. Perak Barat No. 211 Surabaya, Telp. 031.3292310, 3297280, 3297892

Email : [alfijatim@alfijatim.or.id](mailto:alfijatim@alfijatim.or.id) | Website : <https://alfijatim.org/>

## Perlancar Arus Logistik, Purbaya Batasi Penimbunan di TPS 30 Hari

**JAKARTA (LOGISTIK) :** Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan terbaru pada 18 Desember 2025 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara dan Barang yang menjadi Milik Negara.

Aturan tersebut sekaligus menegaskan dan menetapkan bahwa barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) lebih dari 30 hari dapat dinyatakan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD) dan bisa dimusnahkan, dilelang hingga menjadi milik negara.

Beleid yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 itu mulai berlaku setelah 90 hari terhitung sejak diundangkan 31 Desember 2025.

Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Dalam beleid itu disebutkan, bahwa barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) adalah barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya, maupun terhadap barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat (TPB) yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan izinnya.

Terhadap barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya sebagaimana dimaksud beleid itu yakni merupakan barang yang sama sekali tidak diajukan pemberitahuan pabean impor, atau barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran tetapi belum mendapatkan persetujuan pengeluaran impor.

Selain itu, merupakan barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan belum dilakukan pemenuhan persyaratan atas ketentuan larangan dan/atau pembatasan berdasarkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (Iartas).

Kemudian, merupakan barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean ekspor yang tidak dimuat ke sarana pengangkut; barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; barang impor yang diangkut lanjut yang tidak direalisasikan pengangkutannya; atau barang yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean untuk dimasukkan ke TPB yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran impor.

Kemudian, merupakan barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean ekspor yang tidak dimuat ke sarana pengangkut; barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; barang impor yang diangkut lanjut yang tidak direalisasikan pengangkutannya; atau barang yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean untuk dimasukkan ke TPB yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran impor.

Adapun dalam hal terjadi pemindahan lokasi penimbunan ke TPS lain, jangka waktu 30 hari dimaksud dihitung sejak barang ditimbun di TPS tempat barang tersebut pertama kali dilakukan pembongkaran.

Sementara itu, jumlah kontainer yang melewati batas waktu penimbunan atau longstay yang ada di pelabuhan Tanjung Priok diketahui terus meningkat.

Bahkan berdasarkan data yang dihimpun Logistiknews.id pada 6 Januari 2025 jumlahnya nyaris 15 Ribuan Bok, padahal sebelum akhir tahun atau per 30 Desember 2025 hanya sebanyak 13.219 bok.

Berdasarkan data tersebut jumlah kontainer longstay di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok per 6 Januari 2026 mencapai 14.872 bok.

Jumlah itu berasal dari kontainer longstay yang menumpuk lebih dari 30 hari sebanyak 879 bok dan yang menumpuk lebih dari 3 hari

sebanyak 13.993 bok

Adapun jumlah kontainer longstay yang melebihi masa penumpukan lebih dari 3 hari di pelabuhan itu berada di JICT tercatat 4.008 bok, Terminal Peti Kemas (TPK) Koja 2.757 bok, IPC TPK Internasional (OJA) 880 bok, dan IPC TPK Internasional (TSJ) 765 bok.

Kemudian, IPC TPK Domestik (MSA) 912 bok, IPC TPK Domestik (Temas) 49 bok, IPC TPK Domestik (009) 36 bok, IPC TPK Domestik (Adipurusa) 1.070 bok, IPC TPK Domestik (DHU) 829 bok.

Selain itu, New Priok Container Terminal One (NPCT-1) 1.836 bok, Terminal Mustika Alam Lestari (TMAL) 253 bok, dan Prima Nur Panurjwan (PNP) 598 bok.

Sedangkan rincian kontainer yang menimbun lebih dari 30 hari di kawasan pabean pelabuhan Tanjung Priok per 6 Januari 2026 tersebut tersebar di Jakarta International Container Terminal (JICT) sebanyak 406 bok, Terminal Peti Kemas (TPK) Koja 199 bok, IPC TPK Internasional (OJA) 3 bok, dan IPC TPK Internasional (TSJ) 3 bok.

Kemudian, IPC TPK Domestik (MSA) 124 bok, IPC TPK Domestik (Adipurusa) 21 bok, dan IPC TPK Domestik (DHU) 86 bok.

Selain itu, New Priok Container Terminal One (NPCT-1) 18 bok, Terminal Mustika Alam Lestari (TMAL) 12 bok, dan Prima Nur Panurjwan (PNP) 7 bok.

## Pebisnis Logistik Dukung Kebijakan Purbaya, Pelabuhan Bukan Tempat Penimbunan

Pelaku usaha di pelabuhan Tanjung Priok mendukung penuh langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperlancar arus logistik serta menekan kepadatan di pelabuhan akibat kontainer longstay, dan sekaligus mengembalikan fungsi pelabuhan bukan sebagai tempat penimbunan barang.

Dukungan pelaku logistik itu menyusul terbitnya aturan terbaru Kemenkeu pada 18 Desember 2025, yakni PMK 92/2025 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, Adil Karim mengatakan, asosiasinya mendukung beleid Kemenkeu yang mempertegas bahwa fungsi pelabuhan atau TPS bukan sebagai tempat penimbunan barang terlalu lama.

“Secara regulasi, operasional Pelabuhan urusan Kemenhub sedangkan cross border-nya itu urusan Kemenkeu. Tapi semantagatnya, ALFI mendukung kebijakan pemerintah tentang kontainer lebih dari 30 Hari atau longstay itu. Sebab yang pasti kalau 30 hari tidak disubmit atau tidak ada pemberitahuan pabean ke Bea Cukai maka barang yang ada di TPS atau lini 1 pelabuhan dianggap kategori barang tidak dikuasai,” ujar Adil kepada Logistiknews.id, pada Kamis

(8/1/2026).

Aturan tersebut sekaligus menegaskan dan menetapkan bahwa barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) lebih dari 30 hari dapat dinyatakan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) dan bisa dimusnahkan, dilelang hingga menjadi milik negara.

Adil mengungkapkan, berdasarkan regulasi Kemenhub yang ada, terhadap barang impor di TPS lini 1 pelabuhan yang belum submit kepabeanan di hari ke empat, seharusnya dapat direlokasi ke TPS lini 2, dengan juga mempertimbangkan aturan batasan yard occupancy ratio (YOR) maksimal 65% di terminal lini 1 pelabuhan.

“Hal ini supaya tidak mengganggu kapasitas di TPS lini 1 atau pelabuhan,” ujar Adil.

ALFI juga menyarakankan Kemenhub dan Kemenkeu dapat secara bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan batas waktu penimbunan barang di pelabuhan.

Hal senada diutarakan Sekjen Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo) Reza Dharmawan.

“Kami gak masalah dengan beleid terbaru dari Kemenkeu itu. Setuju-setuju saja,” ujar Reza saat dikonfirmasi Logistiknews.id, pada Kamis (8/1/2026).



Sebagaimana diberitakan, pada 18 Desember 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan terbaru pada 18 Desember 2025 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Beleid yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 itu mulai berlaku setelah 90 hari terhitung sejak diundangkan 31 Desember 2025.

Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Dalam beleid itu disebutkan, bahwa barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) adalah barang yang ditimbun Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya, maupun terhadap barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat (TPB) yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan izinnya.

Terhadap barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya sebagaimana dimaksud yakni merupakan barang yang sama sekali tidak diajukan pemberitahuan pabean impor, atau barang yang telah diajukan pemberita-

huan pabean impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran tetapi belum mendapatkan persetujuan pengeluaran impor.

Selain itu, merupakan barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan belum dilakukan pemenuhan persyaratan atas ketentuan larangan dan/atau pembatasan berdasarkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (Iartas).

Kemudian, merupakan barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean ekspor yang tidak dimuat ke sarana pengangkut; barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; barang impor yang diangkut lanjut yang tidak direalisasikan pengangkutannya; atau barang yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean untuk dimasukkan ke TPB yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran impor.

Adapun dalam hal terjadi pemindahan lokasi penimbunan ke TPS lain, jangka waktu 30 hari dimaksud dihitung sejak barang ditimbun di TPS tempat barang tersebut pertama kali dilakukan pembongkaran.

Berdasarkan data yang dihimpun Logistiknews.id, hingga 6 Januari 2026, terdapat 14.872 bok kontainer longstay di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok, dengan rincian yang lebih dari 30 hari sebanyak 879 bok dan yang lebih dari 3 hari 13.993 bok (Logistik/logistiknews.id/hd).

## Pelindo Multi Terminal Pastikan Layanan Pelabuhan Tetap Berjalan Optimal di Periode Libur Nataru

**MEDAN (LOGISTIK) :** PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang operasional terminal nonpetikemas, memastikan kesiapan dan layanan optimal di seluruh pelabuhan yang dikelola selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Komitmen ini mencakup kelancaran pelayanan penumpang maupun arus barang, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas logistik periode Nataru.

Di tengah kebijakan pemerintah terkait imbauan memberikan kesempatan untuk melaksanakan kerja dari lokasi lain atau Work from Anywhere (WFA) selama periode libur Nataru, Pelindo Multi Terminal memastikan bahwa sektor layanan operasional pelabuhan tetap siaga 24 jam, mengingat perannya yang vital dalam menjaga kelancaran mobilitas barang dan penumpang.

Pelindo Multi Terminal tetap menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya di 20 branch/cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia meliputi: Sumatra (Belawan, Malahayati, Lhokseumawe, Dumai, Sibolga, Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun), Jawa (Tanjung Emas, Tanjung Intan, Jamrud Nilam Mirah, Gresik, Tanjung Wangi), Kalimantan (Balikpapan, Trisakti, Bumiharjo Bagendang), Sulawesi (Makassar, Parepare) serta Bali & Nusa Tenggara (Bima Badas, Lembar, Benoa).

Direktur Operasi Pelindo Multi Terminal, Arif Rusman Yulianto menyampaikan bahwa perusahaan tetap memberikan layanan bongkar muat nonpetikemas dan layanan kepelabuhanan lainnya selama periode libur Nataru.

“Kami memastikan layanan operasional pelabuhan berjalan normal selama periode libur Nataru. Sejumlah langkah antisipasi disiapkan untuk menghadapi potensi lonjakan arus barang dan penumpang, serta perubahan cuaca di akhir tahun untuk menjaga kelancaran arus logistik nasional dan kualitas pe-

layanan kepada para pengguna jasa,” jelas Arif.

Dalam menjaga keberlangsungan operasional, Pelindo Multi Terminal melakukan pengecekan kesiapan fasilitas pelabuhan dan peralatan bongkar muat, pelaksanaan layanan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku, penguatan kesiapan sumber daya manusia (SDM) operasional melalui pengaturan pola kerja dan penugasan personel, pengaturan jalur lalu lintas di dalam dan di luar terminal untuk mencegah potensi kepadatan, peningkatan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pemantauan cuaca secara berkala, serta koordinasi intensif dengan sejumlah stakeholders di lingkungan pelabuhan.

Pelindo Multi Terminal juga mendukung kebijakan pemerintah terkait skema pembatasan angkutan barang selama periode Nataru, sehingga aktivitas bongkar muat tetap dapat berlangsung optimal.

Arif menambahkan bahwa para pengguna jasa dapat menghubungi customer relations jika menemui kendala pelayanan operasional pelabuhan nonpetikemas atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai layanan perusahaan.

“Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik dan berkesinambungan di seluruh pelabuhan, baik untuk penumpang maupun barang. Kami memastikan operasional berjalan aman, lancar, dan efisien dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, serta kualitas layanan kepada pengguna jasa. Dengan kesiapan tersebut, kami optimistis dapat menjaga kepercayaan pengguna jasa sekaligus membuka tahun 2026 dengan semangat positif dan kinerja operasional yang semakin baik,” tutup Arif.



## Pelindo Dukung Kelancaran Distribusi Bantuan Kemanusiaan Aceh-Sumut

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan melalui layanan kepelabuhanan yang andal, aman, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sepanjang periode 30 November 2025 hingga 11 Januari 2026, Pelindo Regional 1 mencatat pelayanan terhadap 127 kunjungan kapal yang mengangkut logistik bantuan kemanusiaan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara melalui tiga cabang pelabuhan yang dikelola PT Pelindo Multi Terminal, Subholding Pelindo yang bergerak di bidang operator terminal nonpetikemas. Ketiga cabang pelabuhan tersebut yakni Lhokseumawe, Malahayati, dan Sibolga.

Executive Director 1 Pelindo Regional 1, Jonedi Ramli, menyampaikan bahwa Pelindo berkomitmen penuh mendukung upaya kemanusiaan melalui penyediaan fasilitas pelabuhan dan layanan operasional untuk distribusi bantuan ke wilayah yang terdampak bencana.

“Kami memastikan seluruh layanan kepelabuhanan berjalan optimal agar distribusi bantuan kemanusiaan dapat tiba tepat waktu di daerah terdampak. Ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Pelindo dalam mendukung pemulihan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Jonedi.

Total volume muatan bantuan kemanusiaan yang dilayani mencapai 95.734 ton/m<sup>3</sup>/unit, terdiri atas berbagai kebutuhan penting seperti sembako, jembatan, alat berat, tangki air, mobil RO (Reverse Osmosis), hingga genset.

Sebagai bentuk dukungan terhadap misi kemanusiaan, perusahaan juga memberikan relaksasi bi-

aya layanan kepelabuhanan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanganan bencana.

Dari total 127 kunjungan kapal, Pelabuhan Lhokseumawe melayani 90 kunjungan kapal dengan volume muatan sekitar 82.040 ton/m<sup>3</sup>/unit, sementara Pelabuhan Malahayati melayani 26 kapal dengan volume 13.694 ton/m<sup>3</sup>/unit. Adapun Pelabuhan Sibolga melayani 11 kapal yang mengangkut berbagai jenis logistik strategis. Kapal-kapal tersebut mengangkut bantuan dari berbagai pihak seperti: pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Palang Merah Indonesia (PMI), Badan SAR Nasional (Basarnas), Polri, TNI, Badan Keamanan Laut (Bakamla), PLN, dan sejumlah pihak lainnya.

Direktur Utama Pelindo Multi Terminal, Ary Henryanto menambahkan bahwa Pelindo Multi Terminal sebagai operator pelabuhan memastikan kelancaran layanan operasional selama proses bongkar muat bantuan logistik yang berlangsung di pelabuhan.

“Pelindo Multi Terminal memastikan kesiapan fasilitas, peralatan, serta sumber daya manusia di pelabuhan-pelabuhan tersebut agar distribusi bantuan dapat berlangsung lancar dan tanpa hambatan” ujar Ary.

Pelindo Regional 1 bersama Pelindo Multi Terminal terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), operator kapal serta seluruh pemangku kepentingan terkait di lingkungan pelabuhan guna menjaga aspek keselamatan, keamanan, dan kelancaran arus logistik selama periode penanganan bencana (Logistik/jatimupdate.id/hd).



## Bongkar Muat Normal Meski Priok Dikepung Banjir, ALFI Usulkan Ini

**JAKARTA (LOGISTIK) :** PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) perlu memikirkan kembali upaya pembenahan infrastruktur jalan di dalam area pelabuhan Tanjung Priok guna meminimalisir potensi banjir yang akhir-akhir ini terjadi akibat tingginya curah hujan maupun rob (kenaikan pasang air laut).

“Di sejumlah titik yang seringkali tergenang banjir seperti akses pos 9, jalan Banda, akses ke terminal 3 Priok maupun ke TPFT Graha Segara, perlu dilakukan peninggian jalan supaya tidak lagi tergenang banjir yang bisa menghambat pergerakan angkutan logistik,” ujar Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, Adil Karim, kepada Logistiknews.id, pada Senin siang (12/1/2026).

Sebagaimana diketahui, curah hujan yang cukup tinggi sejak Senin dinihari (12/1/2026) hingga Senin siang hari ini membuat sejumlah titik di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, tak luput dari banjir dengan ketinggian genangan air rata-rata 5 hingga 20 cm.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, genangan dan banjir memang terjadi di sejumlah ruas jalan menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, sebagaimana juga terjadi di berbagai titik lain di Jakarta.

“Namun hingga saat ini kondisi di dalam area operasional pelabuhan tetap terkendali dan seluruh aktivitas kepelabuhanan, termasuk bongkar muat dan layanan terminal tetap berjalan nor-

mal dan lancar,” ujar Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, melalui keterangan resminya pada Senin (12/1/2026).

Dia juga mengimbau kepada pengguna jasa kepelabuhanan agar senantiasa memperhatikan informasi cuaca terkini dan informasi trafik lalu lintas serta mengutamakan aspek keselamatan dalam setiap aktivitas operasional.

Disisi lain, kata Yandri, para operator kapal dan terminal untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan angin dan gelombang. Serta kepada seluruh pegawai pelabuhan agar tetap mematuhi prosedur keselamatan kerja serta waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

“Kami mohon maaf atas pelayanan yang agak tertunda akibat kondisi cuaca saat ini dan kami terus berkoordinasi secara intensif dengan BMKG, KSOP, Bea & Cukai, Polres Pelabuhan dan pihak terkait lainnya guna memastikan kelancaran serta keselamatan operasional pelabuhan karena Keselamatan dan Kelancaran Pelayanan merupakan prioritas utama kami.” ucap Yandri.



## Aturan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia 2025 Jadi Pembahasan Serius di RAPIMWIL 2026 ALFI Jatim

Aturan terbaru Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang tertuang di Peraturan BPS No 7 tahun 2025 menjadi salah satu Pembahasan yang serius, sebab KBLI 2025 ini dipandang akan sangat merugikan pebisnis logistik lokal maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal itu disampaikan saat Rapat pimpinan wilayah (RAPIMWIL) tahun 2026 ALFI/ILFA Jawa timur, Kamis (22/1/2026).

Rapim Wilayah Jawa Timur yang merupakan agenda rutin tahunan untuk mengevaluasi program-program, dan merumuskan langkah ke depan atas segala tantangan yang dihadapi demi menjaga keberlangsungan nafas usaha anggota. “Kegiatan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus terkait kegiatan di tahun 2025 kemarin dari program kerja, usulan, pendapat, mungkin masukan apa saja yang nanti kedepan menjadi satu bahan evaluasi bagi kita semua,” ungkap Ketua umum DPW ALFI Jawa Timur, Sebastian Wibisono saat agenda RAPIMWIL Jawa timur.

Wibi menilai, imbas beleid terbaru KBLI 2025 itu kini meresahkan sekitar 490-an perusahaan JPT di Jawa Timur yang juga merupakan anggota ALFI Jatim, karena akan menimbulkan biaya baru dalam proses penyesuaian perizinan usahanya dengan KBLI 2025.

Namun demikian Kebijakan ini belum konfem, masih ada sekitar lima bulan lagi. “Tentunya kita terus ingin memperjuangkan teman-teman JPT yang sekarang mempunyai KBLI yang sudah berjalan selama lima tahun ke belakang 52991 sebagai KBLI JPT yang nantinya akan berubah,” ujarnya.

Masih menurut Wibi, bahwa pihaknya su-

dah berkoordinasi dengan DPP ALFI untuk bisa melakukan komunikasi dengan Menko Dan lintas kementerian terkait di Jakarta.

“Kita sudah bersurat, tinggal menunggu waktu pemerintah untuk berdiskusi dengan kami. Mohon sabar ini menjadi perjuangan kita semua,” haranya.

Sementara itu Budi Leksono Ketua Bidang Bidang Pemerintahan & Antar Lembaga ALFI Jatim sekaligus anggota DPRD Surabaya Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, bahwa pihaknya mempunyai catatan anggota mengeluhkan terkait perubahan dari BPS tentang perizinan yang dipandang sangat memberatkan atas aturan baru itu.

“Kita berharap aturan KBLI dikembalikan seperti aturan asal,” haranya.

Menurutnya bahwa dari unek-unek anggota yang diterimanya ada mengeluhkan terkait tingginya kemacetan dampak letak eksisting depo yang ada. Rata-rata eksisting depo gudang itu dekat dengan jalan raya yang berdampak menimbulkan kemacetan.

“Ini harus bisa dicermati dalam hal kelolosan perijinan. Karena itu melibatkan provinsi tapi dampaknya dirasakan masyarakat Surabaya,” ujar Budi.

Oleh karena itu harus dalam hal ini ada tanggung jawab bersama sehingga hal itu tidak berlarut larut menjadi bahasan kusut.

“Paling tidak sinergi tiga pilar untuk mencegah kemacetan dilapangan harus ada komunikasi baik pihak Polres, Pemerintah Kota Surabaya dan Asosiasi yang sudah barang tentu melalui KSOP ini menjadi catatan,” pungkasnya (Logistik/berkasnews.com/hd).